

ABSTRAK

Penerapan Hukum Keimigrasian Atas Orang Pemegang Kartu Pengungsi Asing Pelaku Tindak Pidana (Studi Pada Kantor Imigrasi Tangerang)

Bambang Tri Yudono

Keberadaan pengungsi di Indonesia tidak memiliki kejelasan dalam perspektif hukum nasional, karena belum diratifikasinya Konvensi PBB 1951 tentang Status Pengungsi. Komisioner Tinggi PBB atas Pengungsi (UNHCR) diberikan mandat untuk menentukan status pengungsi bagi para pencari suaka yang meminta status pengungsi di Indonesia. Keberadaan pengungsi yang tidak teridentifikasi dalam hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang membagi penduduk menjadi warga negara Indonesia dan Asing. Orang asing wajib memiliki izin tinggal untuk berada di Indonesia dan wajib menaati aturan yang ada di Indonesia, termasuk deportasi bagi warga negara asing yang melanggar ketentuan. Warga negara asing yang mendapatkan kartu pengungsi dari UNHCR pada pembahasan ini telah melakukan tindak pidana, namun tidak dapat di deportasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan melakukan analisa berdasarkan aturan hukum positif, yaitu hukum keimigrasian. Tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, dan Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri tidak dapat memberikan solusi dalam penanganan masalah pengungsi di Indonesia.

Kata Kunci: Pengungsi, Keimigrasian, Pencari Suaka

ABSTRACT

Application of Immigration Law on Refugee Card Holders Foreigners as Criminal Actors (Study at the Tangerang Immigration Office)

Bambang Tri Yudono

The existence of refugees in Indonesia is not clear from the perspective of national law, because the 1951 UN Convention on the Status of Refugees has not yet been ratified. The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) is mandated to determine refugee status for asylum seekers requesting refugee status in Indonesia. The existence of refugees who are not identified in the national law, especially Law Number 6 Year 2011 concerning Immigration which divides the population into Indonesian and foreign citizens. Foreigners are required to have a residence permit to be in Indonesia and are obliged to comply with existing regulations in Indonesia, including deportation for foreign nationals who violate the provisions. Foreign nationals who have received a refugee card from UNHCR in this discussion have committed a criminal offense but cannot be deported. This study uses a normative approach by analyzing positive legal rules, namely immigration law. There are no provisions regulating asylum seekers and refugees in Indonesia, and Presidential Regulation number 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Abroad cannot provide a solution in handling the problem of refugees in Indonesia.

Keywords: Refugees, Immigration, Asylum Seekers